

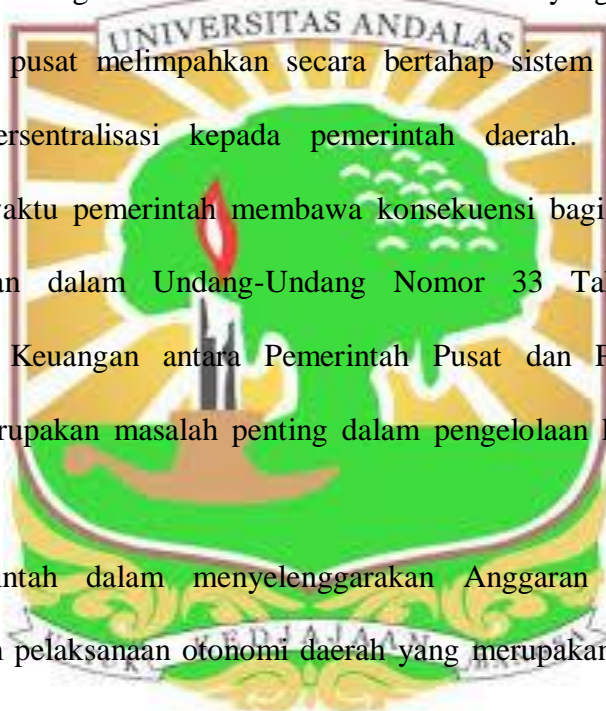
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang bersifat terbuka tang tanggungjawab terhadap Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintahan dapat bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan secara tertib sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pemerintahan pusat melimpahkan secara bertahap sistem pemerintahan yang semulanya tersentralisasi kepada pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen waktu pemerintah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran merupakan masalah penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Pemerintah dalam menyelenggarakan Anggaran memiliki peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan cerminan program kerja daerah. Namun demikian, seluruh SKPD harus dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran agar dapat dilakukan secara cermat dengan pengkajian yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan program kerja yang hendak dicapai untuk menyiapkan pelaksanaan penyusunan anggaran . oleh karena itu, dalam menentukan jumlah anggaran sering ditemukan ketidakefisienan dalam penyusunan anggaran tersebut.



penyusunan anggaran dengan penekanan pertanggungjawaban tidak hanya sekedar pada input tetapi pada *output* dan *outcome*. Yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah Anggaran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari tahun ketahun Perkembangan porsi dana dalam APBD terus meningkat. Komposisi dananya terdiri dari transfer dana dari pemerintah pusat sebagai wujud dana perimbangan atau pendapatan asli daerah. Anggaran yang besar juga harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrument kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

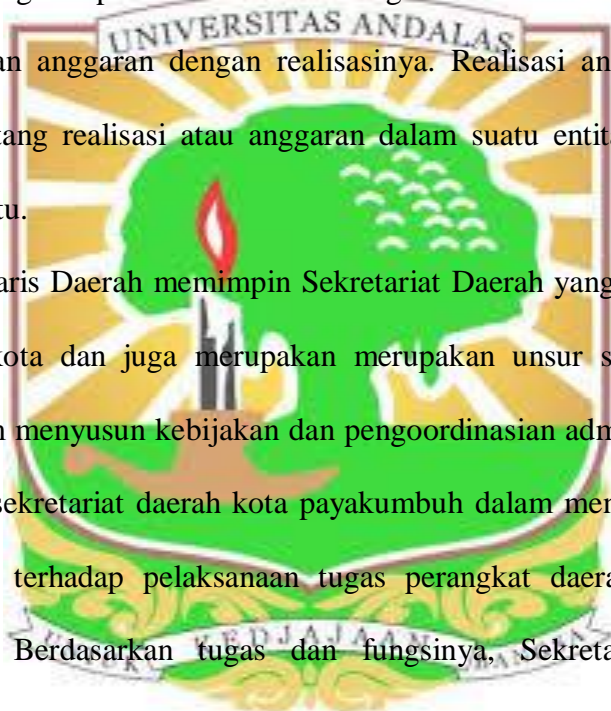
Reformasi keuangan daerah secara esensi menuntut perubahan bagi anggaran berbasis kinerja dalam prosedur penyusunan anggaran. Penganggaran sektor publik berhubungan dengan kebijakan dan prioritas dalam menentukan program kegiatan. Berdasarkan konsep *value of money* yang beroreintansi pada kinerja diperlukan sistem pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dana publik (*public money*). Penentuan kebijakan program kegiatan menyangkut persoalan yang rumit dengan jumlah dana yang terbatas, sehingga dibutuhkan obyektifitas berkaitan dengan belanja daerah. Setiap penganggaran semestinya memperhatikan prioritas pengalokasian yang tepat. Kegiatan penganggaran pada pemerintah daerah melibatkan semua lembaga/instansi



perangkat daerah. Penyusunan anggaran memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu instansi yang dikaitkan dengan penentuan program, kegiatan, penggunaan belanja, analisa standar belanja, penentuan indikator kinerja sampai dengan anggaran belanja yang harus disediakan.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tujuan laporan realisasi anggaran yaitu menyajikan informasi mengenai realisasi dengan anggaran secara bersanding yang disepakati oleh dewan legislatif dan dewan eksekutif dengan menyandingkan anggaran dengan realisasinya. Realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi atau anggaran dalam suatu entitas pelaporan untuk periode tertentu.

Sekretaris Daerah memimpin Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan juga merupakan unsur staf dari sekretariat daerah. Dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif, Walikota dibantu oleh sekretariat daerah kota payakumbuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan daerah, pelayanan administratif atau pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan atau evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota. Bidang perencanaan serta anggaran disebuah instansi pemerintahan merupakan bidang yang memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah instansi. Perencanaan operasional, mengendalikan, mengelola,



mengevaluasi, mengoordinasikan dan melaporkan program serta kegiatan merupakan tugas yang dimiliki oleh bidang perencanaan atau anggaran.

Saat ini pemerintah sudah melakukan usaha cukup baik, tapi masih adanya ditemukan dalam realisasinya bentuk kegiatan yang seharusnya bisa diminimalkan sehingga bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting. Oleh karena itu, penulis ingin proses penyusunan anggaran daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar anggaran dapat terwujud sesuai dengan perencanaan. Karena alasan itu penulis tertarik membahas masalah ini agar dapat disajikan dalam pelaporan Tugas Akhir dengan mengangkat topik: “PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran pada sekretariat daerah kota payakumbuh.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran pada sekretariat daerah kota payakumbuh.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Penulisan ini antara lain :



1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran pada sekretariat daerah kota payakumbuh.
2. Dapat menambah pengalaman bagaimana keadaan di dunia kerja.
3. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggungjawab serta kedisiplinan.

1.5. Data yang dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dari pengamatan untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan terhadap suatu kejadian, kegiatan atau benda yang berupa opini subjek (orang) secara kelompok dan individual. Data ini berupa Prosedur Penyusunan Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Yang berkaitan dengan pengamatan melalui media perantara, yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) dan dipublikasikan pada umumnya berupa laporan historis, bukti dan catatan. Data ini berupa sejarah berdirinya Kota Payakumbuh, Struktur Organisasi serta data yang didapat dari karyawan yang berwenang pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

1.6. Cara Memperoleh Data

Dari hasil pengamatan, beberapa cara yang digunakan penulis antara lain:

1. Observasi

Observasi Menurut Arikunto (2006) merupakan pengumpulan data dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diselidiki yang harus dijalankan. Penulis melakukan pengamatan mengenai penyusunan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang dimulai pada tanggal 7 Januari 2019 s/d 6 Maret 2019. Pengamatan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran yang dilakukan tersebut.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas dan mempelajari berbagai bahan bacaan literatur yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini mengenai “PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REASLISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH” terdiri dari V bab, dimana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, data yang dibutuhkan, cara memperoleh data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, teori apa saja yang berhubungan dengan prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran.



BAB III, dalam bab ini terdiri dari Gambaran Umum Institusi yang akan membahas gambaran umum sekretariat daerah yang meliputi sejarah berdirinya kota payakumbuh, visi dan misi, struktur organisasi, dan strategi sekretariat daerah kota payakumbuh.

BAB IV, hasil pengamatan dan pembahasan tentang penyusunan anggaran atau realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V, Merupakan penutup dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta memberikan saran yang relevan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan.

